

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh James H Davis, F David Schoorman, dan Lex Donaldson pada awal 1989, pada tahun 1991 dan diperkuat kembali dalam artikel lanjutanya pada tahun 1997. Teori ini muncul sebagai *respons* terhadap dominanya *Agency Theory*, yang mengasumsikan bahwa manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi sehingga memerlukan kontrol dan insentif yang ketat. Donaldson dan Davis berpendapat bahwa asumsi tersebut tidak selalu mencerminkan realitas, terutama dalam organisasi yang berorientasi pada nilai sosial. *Stewardship theory* memandang bahwa manajer atau aparatur dapat bertindak sebagai *stewards*-pengelola yang memiliki integritas, dedikasi dan orientasi kuat terhadap tujuan organisasi (Asnawi, 2025:123)

Dalam konteks organisasi publik, konsep *stewardship* sangat relevan. Aparatur pemerintah tidak sekedar menjalankan fungsi administratif, tetapi bertanggung jawab sebagai penjaga amanah publik (*public steward*). Mereka dituntut menjaga kepentingan masyarakat, mengelola sumber daya secara etis, dan menjaga keberlangsungan layanan (Asnawi, 2025:124).

### 2.1.1 *Fiscal stress*

#### 2.1.1.1 Definisi *Fiscal stress*

Belum adanya definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal menyebabkan para peneliti merumuskan definisi operasionalnya masing-masing. Perumusan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian serta mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan data yang digunakan (Arnett, 2012).

Secara terminologis, *fiscal stress* tersusun atas dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *fiscal* dan *stress*. Kata *fiscal* berkaitan dengan keuangan atau anggaran, sedangkan *stress* bermakna tekanan atau kondisi yang menimbulkan beban. Berdasarkan pemaknaan tersebut, *fiscal stress* secara umum dapat dipahami sebagai kondisi tekanan yang dihadapi suatu pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan atau anggarannya.

Pemahaman terminologis tersebut sejalan dengan definisi konseptual yang dikemukakan oleh Arnett (2012:50), yang menyatakan bahwa *fiscal stress* merupakan kondisi ketika pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta tidak mampu meningkatkan penerimaan daerah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, kondisi *fiscal stress* juga ditandai oleh keterbatasan keuangan daerah akibat rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). Keadaan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal lainnya, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi (Nurhayati, 2020).

Selain dilihat dari aspek kemampuan keuangan, *fiscal stress* juga dapat dipahami dari perspektif kesiapan daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi. Djirimu dan Tombolotutu (2021:359) memaknai *fiscal stress* sebagai kondisi ketika daerah belum memiliki kesiapan yang memadai dalam memasuki era otonomi daerah. Ketidaksiapan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Lebih lanjut, *fiscal stress* mencerminkan adanya tekanan yang signifikan terhadap stabilitas keuangan pemerintah daerah. Tingginya tingkat *fiscal stress* umumnya disebabkan oleh meningkatnya tuntutan kemandirian fiskal daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran, seperti belanja daerah (Padang & Padang, 2024). Apabila peningkatan pengeluaran tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang sepadan, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit anggaran serta menurunkan kualitas layanan publik, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Sholihat & Lubis, 2024).

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiscal stress* adalah keadaan keuangan daerah yang sedang berada dalam kondisi sulit, di mana pendapatan daerah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pengeluarannya.

#### **2.1.1.2 Penyebab *Fiscal stress***

Menurut Arnett (2012:49), *fiscal stress* dapat muncul akibat berbagai kondisi yang berbeda pada setiap pemerintah. Sebagai ilustrasi, di Negara Bagian Michigan, tekanan fiskal terjadi akibat penurunan jumlah penduduk dan melemahnya basis ekonomi, yang pada akhirnya membatasi kemampuan

pemerintah dalam mempertahankan tingkat pendapatan. Sementara itu, di California, *fiscal stress* dipicu oleh defisit anggaran yang besar serta keterbatasan pemerintah dalam menaikkan pajak atau mengurangi layanan publik guna menutup kesenjangan fiskal. Arnett juga menegaskan bahwa *fiscal stress* dapat muncul dalam berbagai bentuk lainnya, seperti ketidakseimbangan anggaran maupun ketergantungan terhadap utang, sehingga penyebab tekanan fiskal dapat bervariasi antar wilayah dan antar periode.

Manafe et al. (2018) menyatakan bahwa *fiscal stress* dapat terjadi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, adanya pembatasan terhadap jenis dan jumlah pajak yang dapat dipungut justru menimbulkan tekanan fiskal bagi pemerintah daerah. Selain itu, perbedaan potensi sumber daya dan tingkat kesiapan fiskal antar wilayah yang tidak merata turut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan fiskal muncul ketika kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan belanja yang harus dipenuhi. Pada tingkat daerah, kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh meningkatnya tuntutan kemandirian fiskal yang tidak diimbangi dengan kapasitas pendapatan yang berkembang secara merata antar wilayah.

### 2.1.1.3 Pengukuran *Fiscal stress*

Untuk memahami sejauh mana tingkat tekanan fiskal yang dialami pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, diperlukan proses pengukuran yang tepat. Tekanan fiskal muncul ketika pengeluaran daerah meningkat, terutama untuk belanja pelayanan dasar dan pembangunan, namun tidak diikuti oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang sepadan (Julia et al, 2025).

$$\text{Fiscal Stress} = \text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Total Belanja Daerah}$$

Menurut Arnett (2012:62), terdapat lima kategori utama yang digunakan untuk mengukur *Fiscal stress* pada tingkat pemerintah daerah:

1. Defisit anggaran (*budget deficit*).
2. Saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*yearend unserved budget balance*).
3. Penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performance*).
4. Peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*).
5. Rasio keuangan (*financial ratios*).

## 2.1.2 Belanja Modal

### 2.1.2.1 Definisi Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Hidayat (2017:82) menjelaskan belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Patarai (2017:275) yang menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat luas yang nantinya akan berupa aset-aset tetap seperti jalan, jembatan, halte, stasiun, dapat juga berupa gedung pemerintahan meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan jenis pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang atau lebih dari satu periode serta dimanfaatkan dalam penyelenggaraan *public service*.

#### **2.1.2.2 Peran Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Alokasi belanja modal yang tepat berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Sihotang et al., 2025). Melalui penyesuaian alokasi belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah, pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sekaligus menyediakan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Nuwun et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan belanja modal mampu mempercepat pembangunan sektor prioritas, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, alokasi belanja modal secara ideal perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis belanja lain yang kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

#### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, belanja modal diklasifikasikan ke dalam lima jenis utama:

##### **1) Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### **2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

#### **2.1.2.4 Pengukuran Belanja Modal**

Menurut Rustiyani, Sukma, dan Barus (2023), belanja modal suatu daerah dihitung berdasarkan seluruh komponen pengeluaran pemerintah daerah yang

digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap baru, meningkatkan kualitas aset yang sudah ada, atau menambah masa manfaat aset tersebut. Komponen belanja modal tersebut meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Secara matematis, alokasi belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja jalan, irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap lainnya.}$$

### 2.1.3 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Darmadi (2021:27) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang mencerminkan kondisi sumber daya suatu daerah, yang ditunjukkan melalui partisipasi masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, khususnya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan tujuan yang direncanakan secara optimal (Bastian, 2023:280).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Patarai (2017:294) mendefinisikan efektivitas PAD sebagai analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Darmadi (2021:27) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah komponen yang menggambarkan mengenai kondisi sumber daya suatu daerah, seperti partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya dengan cara pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerahnya untuk menghasilkan penerimaan dari sumber-sumber PAD, serta kemampuan dalam merealisasikan pendapatan yang telah ditargetkan secara maksimal. Efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan secara mandiri.

#### **2.1.3.2 Sumber -Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat sumber utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Keempat komponen PAD ini merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. Berikut adalah komponen PAD tersebut:

#### **2.1.3.2.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah:

##### **a) Pajak Provinsi**

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

##### **b) Pajak Daerah Kabupaten**

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame

4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.3.2.2 Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Mardiasmo (2019:20) menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah yang menjadi objek retribusi:

##### **a) Retribusi Jasa Umum:**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Pasar
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

b) Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

c) Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Trayek

#### **2.1.3.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian dari kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, komponen ini mencakup objek pendapatan berupa bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank maupun non-bank, serta bagian laba yang berasal dari penyertaan modal atau investasi daerah (Darmadi, 2021:32).

#### **2.1.3.2.4 Lain-lain PAD yang Sah**

Menurut (Nasir, 2019), pendapatan daerah yang sah diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan sebagai salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Tuntutan ganti rugi
- e) Komisi
- f) Potongan
- g) Keuntungan selisih kurs
- h) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

#### **2.1.3.3 Pengukuran Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Pengukuran Efektivitas PAD menggunakan Rasio efektivitas, yaitu dengan membagi realisasi PAD yang diperoleh dengan jumlah PAD yang dianggarkan, lalu dikalikan seratus persen. Semakin tinggi nilai rasio yang dicapai, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sesuai yang telah direncanakan (Mutsalisah et al., 2025)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kategori rasio efektivitas diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Efektivitas PAD**

| <b>Presentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| >100%             | Sangat Efektif  |
| 100%              | Efektif         |
| 90%-99%           | Cukup Efektif   |
| 75%-89%           | Kurang Efektif  |
| < 75%             | Tidak Efektif   |

Sumber: Mahmudi (2019).

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah**

##### **2.1.4.1 Definisi Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan APBD serta kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara konseptual, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas maupun kualitas yang terukur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (32) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pasal 1, ayat (1) Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai kemadirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu (Patarai, 2017:197).

Mahsun (2017:25) menjelaskan bahwa pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, diukur melalui indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan, untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki (Oktrivina & Mariana 2020).

Kinerja keuangan instansi pemerintah menggambarkan hasil dari cara instansi tersebut mengatur dan menggunakan keuangannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan program dan kebijakan sesuai dengan visi, misi, serta strategi yang telah ditetapkan (Nasution, 2018).

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana hasil yang diperoleh dan tingkat capaian pemerintah daerah dalam mengelola aspek keuangannya. Penilaian ini dilakukan melalui ukuran atau indikator keuangan tertentu yang ditetapkan dari laporan keuangan APBD baik itu pendapatan ataupun penjualan, dengan tujuan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan daerah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya keuangannya secara efektif.

#### **2.1.4.2 Indikator Kinerja Keuangan**

Menurut Mahsun (2017:148) terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah:

- 1) Indikator Masukan (*Input*)
  - a) jumlah dana yang dibutuhkan
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan,
  - c) Jumlah infrastruktur yang ada, dan
  - d) Jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator Proses (*Process*)
  - a) Ketaatan pada peraturan perundangan.
  - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa.
- 3) Indikator Keluaran (*Output*)
  - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*)
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.

- b) Produktivitas para karyawan atau pegawai.
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*)
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat.
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat.
- 6) Indikator Dampak (*Impact*)
  - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

#### **2.1.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Daerah**

Pengukuran kinerja keuangan sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Azaluddin, 2023:119).

#### **2.1.4.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Patarai, 2017:205).

Setiap pemerintah daerah memiliki ukuran tersendiri dalam menilai kinerja keuangannya. Penilaian tersebut umumnya dilakukan melalui sejumlah rasio keuangan daerah, di antaranya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian (Oktrivina et al, 2020).

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, sehingga menggambarkan sejauh mana kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin baik kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Melalui pengukuran ini, dapat memperlihatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adapun rumus Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2019:140) adalah:

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, diperlukan sejumlah kriteria penilaian tertentu:

**Tabel 2.2**

#### **Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

| <b>Presentasi Desentralisasi</b> | <b>Kriteria Desentralisasi</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 20% - 29,99%                     | Sangat Rendah                  |
| 30% - 39,99%                     | Rendah                         |
| 40% - 49,99%                     | Sedang                         |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 50% - 59,99% | tinggi        |
| >60%         | Sangat Tinggi |

Sumber: Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2019:140) adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

### **Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah**

| <b>Kemampuan Daerah</b> | <b>Presentase Kemandirian</b> | <b>Kemandirian</b> |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Rendah Sekali           | 0% - 25%                      | Instruktif         |
| Rendah                  | 25% - 50%                     | Konsultatif        |
| Sedang                  | 50% - 75%                     | Partisipatif       |
| Tinggi                  | 75% - 100%                    | Delegatif          |

Sumber: Mahmudi (2019).

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas dilakukan dengan membagi realisasi PAD yang diperoleh dengan jumlah PAD yang dianggarkan, lalu dikalikan seratus persen. Semakin tinggi nilai rasio yang dicapai, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sesuai yang telah direncanakan (Mutsalisah et al., 2025)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kategori rasio efektivitas diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Efektivitas Daerah**

| <b>Presentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| >100%             | Sangat Efektif  |
| 100%              | Efektif         |
| 90%-99%           | Cukup Efektif   |
| 75%-89%           | Kurang Efektif  |
| < 75%             | Tidak Efektif   |

Sumber: Mahmudi (2017).

### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi ini menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Berikut rumus untuk Rasio Efisiensi (Patarai, 2017:266).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi keuangan pada umumnya diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

| Persentase Efisiensi | Kriteria Efisiensi  |
|----------------------|---------------------|
| < 100%               | Efisiensi           |
| 100%                 | Efisiensi Berimbang |
| >100%                | Tidak Efisiensi     |

Sumber: Patarai (2017).

## 5. Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja digunakan untuk menilai proporsi alokasi anggaran pemerintah daerah pada jenis belanja yang berbeda, khususnya belanja operasional dan belanja modal. Indikator ini menggambarkan sejauh mana struktur belanja daerah mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara optimal. Dalam pengukurannya, rasio keserasian belanja terdiri dari dua komponen, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, yang masing-masing dianalisis untuk melihat keseimbangan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat investasi pembangunan.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel barometer keserasian belanja:

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Keserasian Belanja**

| Perbandingan                                  | Kriteria Keserasian |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal | Kurang Baik         |
| Jumlah Belanja Operasi : Jumlah Belanja Modal | Cukup Baik          |
| Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal | Baik – Sangat Baik  |

Sumber: Fathah (2017).

#### 6. Rasio Pertumbuhan

Menurut Patarai (2017:266) analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } Th_t - \text{PAD } Th_{t-1}}{\text{PAD } Th_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD  $Th_t$  : Jumlah PAD pada tahun yang dihitung

PAD  $Th_{t-1}$  : Jumlah PAD pada tahun sebelumnya

Berdasarkan rumus di atas berikut adalah tabel barometer rasio pertumbuhan sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD**

| Presentase | Kriteria Pertumbuhan |
|------------|----------------------|
| 76% - 100% | Baik                 |
| 51% - 75%  | Cukup Baik           |
| 26% - 50%  | Kurang Baik          |
| 0% - 25%   | Tidak Baik           |

Sumber: Patarai (2017)

## 7. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang bermanfaat untuk melihat sampai mana kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Mahmudi, 2019:145).

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019:145), standar keberhasilan untuk rasio solvabilitas ditetapkan sebesar 2:1. Artinya, setiap total aktiva sebesar Rp2 dapat menjamin kewajiban atau utang sebesar Rp1 secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa metode pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memilih rasio efisiensi sebagai indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi dipilih karena indikator ini mampu menunjukkan seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, semakin efisien pengelolaan anggaran, maka kinerja keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik, karena pemerintah mampu meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hasil pendapatan yang maksimal.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan rekapitulasi penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan variabel yang dikaji sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian:

1. Oktaviani Putri, Nella Yantiana, dan Gita Desyana (2025) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Belanja modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Pendapatan Transfer berpengaruh negatif namun signifikan, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara Bersama-sama, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
2. Rina Julia, Bainil Yulina, dan Riana Mayasari (2025) dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah, *Fiscal stress*, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah” hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan Bersama-sama Belanja Daerah, *Fiscal stress*, Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Okadri dan Yentisna (2025) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024” hasil penelitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta secara simultan. PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang.
4. Diana Togu Sihotang, J. Ary Mollet dan Halomoan Hutajulu (2025) dengan judul “Pengaruh Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi

Papua Pegunungan” hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD dan ukuran pemerintah daerah belum terbukti mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong perubahan kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah.

5. Susi Susanti, Iskandar Sam dan Yudi (2025) dengan judul “*The Influence of Capital Expenditure, Economic Growth, And Fiscal stress on Local Government Financial Performance*” hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
6. Naila Maharani, Maria, Rosy Armaini (2025) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Arfiatul Mutsalisah, Ainiyyah Kusumastuti dan Adinda Zaimatunnisa (2025) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023”

hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan karena realisasi selalu melampaui target anggaran, sementara rasio pertumbuhan berpengaruh negatif karena PAD masih rendah dan tidak konsisten terhadap Kinerja Keuangan.

8. Diana Megasari (2025) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Provinsi Se Indonesia Tahun 2019-2023” hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat juga berpengaruh positif signifikan, opini audit juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
9. Novi Natalia Padang, dan Wendi Suprpto Padang (2024) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Dan *Fiscal stress* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sedangkan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10. Iis Sholihat dan Tona Aurora Lubis (2024) dengan judul “Analisis Flypaper *Effect*, *Fiscal stress* Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Tax Effort Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi-Provinsi Di Pulau Sumatera” hasil penelitian menunjukkan bahwa Flypaper *effect* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. *Fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Karakteristik

pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Flypaper *effect* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh tax effort. *Fiscal stress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh tax effort. Karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh *tax effort*.

11. Sari Yuliawati, Meti Zulyana, dan Sasiska Rani (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pengujian secara parsial mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
12. Rahil, Dwiyatmoko Puji Widodo dan Yuni Siti Nuraeni (2024) dengan judul “Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dki Jakarta Periode 2018-2023” hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Efektivitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

13. Anggi Juwita dan Khairita Hasbi (2024) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022” hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera.
14. Nova Rustiyani dan Irene Sukma Lestari Barus (2023) dengan judul “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
15. Yeyen, Kartika Rachma Sari, dan Choiruddin (2023) dengan judul “Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Belanja Daerah, terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.” hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas

Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Daerah.

16. Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
17. Novita Niswani, Ikhyanuddin, Rayyan Firdaus dan Nurhasanah (2022) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
18. Fadhli, Asnawi, dan Jummaini (2022) dengan judul “Peran *Tax Effort* Pada Pengaruh *Flypaper Effect* Dan *Fiscal stress* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh” hasil penelitian menunjukkan bahwa Efek flyaper berpengaruh negatif dan signifikan sebagian terhadap kinerja keuangan daerah. Tekanan fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Tax effort berpengaruh positif dan signifikan sebagian terhadap kinerja keuangan daerah.

19. Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, Ni Luh Putu Dita Silviani, dan dan Kadek Meila Anggraeni (2022) dengan judul “*The Effect of Local Revenue, Fiscal Decentralization, dan Fiscal stress on Government Financial Performance*” hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan tekanan fiskal tidak berpengaruh positif signifikan atau tidak meningkatkan kinerja keuangan daerah, sedangkan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan.
20. Anynda dan Hermanto (2020) dengan judul “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.8

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                        | Persamaan                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                         | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Referensi                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                 |
| 1   | Putri et al. (2025)<br><br>Judul:<br>Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024. | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah | Variabel Independen: Transfer pemerintah pusat<br>Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br><br>Tempat Penelitian: Kalimantan Barat<br><br>Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda. | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Pendapatan Transfer berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Secara Bersama-sama, ketiga variabel berpengaruh signifikan | <i>JIMEA: Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)</i> Vol. 9 No.2, Agustus 2025.<br><br>Universitas Tanjungpura.<br><br>E-ISSN: 2621-5306 |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                             | Persamaan                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                           | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Referensi                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | terhadap Kinerja Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| 2   | Julia et al. (2025)<br><br>Judul:<br>Pengaruh Belanja Daerah, <i>Fiscal stress</i> , Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah                                   | Variabel Independen: <i>Fiscal stress</i> Efektivitas Pendapatan Asli Daerah<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan. | Variabel Independen: Belanja Daerah<br><br>Tempat Penelitian: Sumatera Selatan<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda.                                       | Secara parsial dan Bersama-sama Belanja Daerah, <i>Fiscal stress</i> , Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.                                                                                                                    | Jurnal Media Akuntansi, Vol. 8 No. 1, September 2025: 147 – 158<br><br>Politeknik Negeri Sriwijaya<br><br>E-ISSN: 2722-5577                              |
| 3   | Okadri dan Yentisna. (2025)<br><br>Judul:<br>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024                    | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan<br><br>Tempat Penelitian: Padang           | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda.                                                                          | PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta secara simultan. PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang. | <i>Journal of Business Economics and Management</i> Vol. 01 No. 03 Januari 2025 Page. 558-566<br><br>Universitas Dharma Andalas<br><br>E-ISSN: 3063-8968 |
| 4   | Sihotang et al., (2025)<br><br>Judul:<br>Pengaruh Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Papua Pegunungan | Variabel Independen: Efektivitas PAD Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan                            | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah Ukuran Pemerintah Daerah<br><br>Tempat Penelitian: Papua Pegunungan<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda. | Efektivitas PAD dan ukuran pemerintah daerah belum terbukti mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.<br><br>Kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.                                                                   | <i>Indonesian Journal of Public Administration Review</i> : Volume 3, Number 1, 2025, Page: 1-9.<br><br>Universitas Cenderawasih<br><br>E-SSN: 3030-8682 |
| 5   | Susanti et al., (2025)<br><br>Judul:<br><i>The Influence of Capital Expenditure, Economic Growth, And Fiscal stress on Local Government</i>                                                    | Variabel Independen: Belanja modal <i>Fiscal stress</i><br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah            | Variabel Independen: Perumbuhan ekonomi<br><br>Tempat Penelitian: Jambi                                                                                             | Belanja modal dan <i>fiscal stress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah,<br><br>Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh                                                                                                                              | Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 17, Number 1, April 2025, hlm. 23 - 38<br><br>Universitas Jambi<br><br>P-ISSN:                                        |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                              | Persamaan                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Referensi                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                               | (4)                                                                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)                                                                                                                                                                        |
|     | <i>Financial Performance</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Alat Analisis: Regresi linier berganda.                                                                                                                                  | signifikan terhadap kinerja keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 11979-4851                                                                                                                                                                 |
| 6   | Maharani et al., (2025)<br><br>Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022.   | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.<br><br>Alat Analisis: Data Panel | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Tempat Penelitian: Sumatera dan Jawa                                                                     | Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 21 No.4, Januari 2025: 576 – 589<br><br>Politeknik Negeri Sriwijaya<br><br>E-SSN: 2622 - 1845                                          |
| 7   | Mutsalisah et al., (2025)<br><br>Judul: Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023.                        | Variabel Independen: Efektivitas PAD<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan.                                                  | Variabel Independen: Pertumbuhan PAD<br><br>Tempat Penelitian: Ponorogo<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda.                                                   | Efektivitas PAD berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.                                                                                                                                   | <i>Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics</i> (NSAFE), 2025, Vol. 5 No. 1, Hal 116 - 123<br><br>Universitas Negeri Malang<br><br>ISSN: 2797-0760 |
| 8   | Diana Megasari (2025).<br><br>Judul: Pengaruh Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Provinsi Se Indonesia Tahun 2019-2023. | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan                                                     | Variabel Independen: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Opini Audit<br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Se Indonesia<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda. | Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit juga berpengaruh positif signifikan                                                                                                                 | Neraca Manajemen, Ekonomi Vol. 24 No. 9 Tahun 2025<br><br>Universitas Muhammadiyah Riau<br><br>ISSN: 3025-9495                                                             |
| 9   | Padang dan Padang (2024).<br><br>Judul:                                                                                                                                                         | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br><i>Fiscal stress</i>                                                                    | Tempat Penelitian: Sumatera Utara                                                                                                                                        | <i>Fiscal stress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.                                                                                                                                                                                      | Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT). Vol 3 No. 1 April 2024.                                                                                                                   |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                                                                   | Persamaan                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                               | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Referensi                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                                                                                                                                        |
|     | Pengaruh Belanja Modal Dan <i>Fiscal stress</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                          | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah<br>Alat Analisis: Regresi Data Panel. |                                                                                                                                                                                                                                         | Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Universitas Katolik Santo Thomas<br>E-ISSN: 2829-1913                                                                                      |
| 10  | Sholihat dan Aurora Lubis (2024).<br><br>Judul: Analisis <i>Flypaper Effect</i> , <i>Fiscal stress</i> Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan <i>Tax Effort</i> Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera | Variabel Independen: <i>Fiscal stress</i><br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah | Variabel Independen: <i>Flypaper Effect</i><br>Karakteristik Pemerintah Daerah<br><br>Variabel Moderasi: <i>Tax Effort</i><br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Pulau Sumatera<br><br>Alat Analisis: Moderated Regression Analysis (MRA). | <i>Flypaper effect</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br><i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br><i>Flypaper effect</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh tax effort.<br><br><i>Fiscal stress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh tax effort.<br><br>Karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh tax effort. | Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 13 No. 05, Desember 2024 (Edisi Khusus).<br><br>Universitas Jambi<br>E-ISSN: 2685-9424 |
| 11  | Yuliawati et al., (2024).<br><br>Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan                                                                                                                                                                      | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah:       | Variabel Independen: PAD Dana Perimbangan<br><br>Tempat Penelitian:                                                                                                                                                                     | Secara Bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Belanja Modal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 6, No.1, hal. 13 – 29, Juli-Desember 2024.                                                         |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                       | Persamaan                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                     | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Referensi                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                   | (4)                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                        |
|     | Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera                                                                                                                              |                                                                                                                       | Kab/Kota Di Provinsi Sumatera                                                                                                 | keuangan pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Universitas Tridinanti                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | Alat Analisis: Regresi linier Berganda.                                                                                       | Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.                                                                                    | E-ISSN: 2827-9328                                                                                                                                                          |
| 12  | Rahil et al.,(2024)<br><br>Judul:<br>Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dki Jakarta Periode 2018-2023. | Variabel Independen: Efektivitas PAD<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.                    | Variabel Independen: Belanja Daerah<br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Jakarta<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda. | Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah<br><br>Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah<br><br>Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. | Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Oktober 2024, Vol. 12 No.2, Hal.107-115<br><br>Universitas Bina Sarana Informatika<br><br>E-ISSN: 2715-1158              |
| 13  | Juwita et al., (2024)<br><br>Judul:<br>Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022.                    | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah<br><br>Alat Analisis: Data Panel | Variabel Independen: Pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)<br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Aceh                        | Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.                               | Jurnal EMT KITA <i>Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology</i> Volume 9 (1) January 2025, 78.<br><br>Politeknik Kutaraja,<br><br>E-ISSN: 2549-6204 |
| 14  | Rustiyani et al. (2023)<br><br>Judul:                                                                                                                                                                                    | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen:                                                          | Variabel Independen: Dana Perimbangan                                                                                         | Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama                                                                                                                                                                                                               | Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 6 No. 2, Desember 2023, pp.250-266.                                                                                                   |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                          | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Referensi                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                                                                                                                                                                 |
|     | Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat                                                                    | Kinerja Keuangan.                                                                                                                | Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br><br>Tempat Penelitian: Kabupaten Bandung Barat<br><br>Alat Analisis: <i>Regresi Error Correction Model (ECM)</i> . | berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.<br><br>Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. | Universitas Widyatama Bandung<br><br>E-ISSN: 2656-7652                                                                                                              |
| 15  | Yeyen, Sari, et al. (2023).<br><br>Judul: Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Belanja Daerah, terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. | Variabel Independen: Efektivitas PAD<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah<br><br>Alat Analisis: Regresi Data Panel. | Variabel Independen: Kemandirian Daerah<br><br>Belanja Daerah,<br><br>Tempat Penelitian: Sumatera Selatan.                                         | Rasio Kemdandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Daerah.                                                                                                                                                                | BENEFIT: <i>Journal Of Business, Economics, Dan Finance</i> Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2344-2359<br><br>Politeknik Negeri Sriwijaya<br><br>E-ISSN: 2986-545X. |
| 16  | Bilqis & Priyono. (2023)<br><br>Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020.       | Variabel Independen: Belanja Modal<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan                                                    | Variabel Independen: PAD<br><br>Tempat Penelitian: Jawa Tengah<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda.                                      | Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.<br><br>Belanja Modal negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.                                                                                                                            | JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 2, Februari 2023<br><br>Universitas Tidar<br><br>E-ISSN: 2963-1181                                                                 |
| 17  | Niswani et al. (2022)<br><br>Judul: Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan PAD Terhadap                                                                                           | Variabel Independen: Belanja Modal,<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah                                        | Variabel Independen: Dana Perimbangan<br><br>Pendapatan Asli Daerah<br><br>Tempat Penelitian:                                                      | Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>Dana perimbangan dan PAD tidak berpengaruh                                                                                                                                                        | Jurnal Akuntansi Malikussaleh JAM, Volume 1, No,1 Juli 2022.<br><br>Universitas Malikussaleh                                                                        |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                         | Persamaan                                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                                                                | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Referensi                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6)                                                                                                                                                      |
|     | Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020                                                                                                                       | Alat Analisis: Data Panel.                                                                                                            | Provinsi Aceh                                                                                                                                                            | signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.                                                                                                                                                                                                                                | E-ISSN: 2962-6927                                                                                                                                        |
| 18  | Fadhli, et al. (2022)<br><br>Judul: Peran <i>Tax Effort</i> Pada Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> Dan <i>Fiscal stress</i> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh | Variabel Independen: <i>Fiscal stress</i><br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah<br><br>Alat Analisis: Regresi Data Panel. | Variabel Independen: <i>Tax Effort Flypaper Effect</i><br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Aceh                                                                           | Efek flyaper berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>Tekanan fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.<br><br>Tax effort berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. | J-MIND: Jurnal Manajemen Indonesia Vol.7, No.2, Desember 2022. Universitas Malikussaleh Lhokseumaw<br><br>E-ISSN: 2797-3948                              |
| 19  | Nyoman Ayu et al. (2022)<br><br>Judul: <i>The Effect of Local Revenue, Fiscal Decentralization, dan Fiscal Stress on Government Financial Performance</i>                                  | Variabel Independen: <i>Fiscal Stress</i><br><br>Variabel Dependen: <i>Government Financial Performance</i>                           | Variabel Independen: <i>Fiscal Decentralization. The Effect of Local Revenue,</i><br><br>Tempat Penelitian: Provinsi Bali<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda. | <i>Local revenue</i> dan <i>fiscal stress</i> tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.<br><br><i>Fiscal decentralization</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah,                                                               | EAJMR: East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR). Vol. 1, No. 9, 2022: 1887-1902. Universitas Pendidikan Ganesha<br><br>E-ISSN: 2828-1519 |
| 20  | Anynda dan Hermanto. (2020)<br><br>Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah           | Variabel Independen: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah                             | Variabel Independen: Rasio Kemandirian Daerah Pengelolaan Belanja Daerah<br><br>Tempat Penelitian: Jawa Timur<br><br>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda              | Rasio Kemandirian daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.                                                                                                                                       | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9 Nomor 10 Oktober 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.<br><br>E-ISSN: 2460-0585      |

| No  | Peneliti, Tahun,<br>Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                               | Persamaan | Perbedaan | Hasil penelitian | Sumber Referensi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                 | (3)       | (4)       | (5)              | (6)              |
|     | Siti Rospiyyah Muawiyah (2025) <b>Pengaruh <i>Fiscal stress</i>, Belanja Modal, Dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</b> (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024). |           |           |                  |                  |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Kewenangan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen utama dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan keuangan dalam kerangka otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas penyusunan dan pemanfaatan APBD secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik demi tercapainya kesejahteraan bersama. Sebagai bentuk amanah tersebut, pemerintah dituntut tidak hanya mampu mengelola keuangan secara transparan, namun juga produktif dalam setiap penggunaan anggaran. Pandangan ini selaras dengan *Stewardship Theory*, yang

menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai pengelola (*steward*) yang berkewajiban mengoptimalkan seluruh potensi fiskal daerah untuk kepentingan publik, bukan untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Donaldson & Davis, (1991) *Stewardship Theory*, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk mencapai tujuan organisasi.

*Teori Stewardship* dapat diimplementasikan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik pada dasarnya dikembangkan untuk menyediakan informasi yang mampu menggambarkan hubungan pertanggungjawaban antara *steward* dan *principal*. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang harus mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Pengelolaan tersebut tidak ditujukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk mencapai tujuan organisasi berupa peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah kinerja keuangan, kinerja keuangan yang baik menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang optimal.

Menurut Amelia Oktrivina dan Ira Mariana (2020) Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, dan diukur melalui indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah

diukur menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan output secara optimal. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Fathah (2017), menjelaskan bahwa nilai rasio yang semakin kecil mencerminkan semakin efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk mendukung pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan tercermin pada kinerja keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Berbagai faktor diketahui memengaruhi kinerja keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2024) menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian oleh Diana Megasari (2025) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Yeyen, Kartika Rachma Sari, dan Choiruddin (2023) menyatakan bahwa secara parsial efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini pada tiga faktor utama yaitu, *fiscal stress*, belanja modal, dan efektivitas PAD. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dinilai memiliki keterkaitan

yang erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keberlanjutan keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ketika daerah berada dalam kondisi *fiscal stress*, yaitu tekanan fiskal yang muncul karena pendapatan daerah tidak mampu menutupi kebutuhan belanja, maka ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program publik menjadi terbatas (Julia et al., 2025). Situasi ini menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih cermat, agar kinerja pemerintah daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak mengalami penurunan. Oleh sebab itu, *fiscal stress* dipandang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, *fiscal stress* diukur dari selisih antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah.

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, *fiscal stress* cenderung menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Julia et al. (2025) serta Padang et al. (2024) menemukan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Susanti et al. (2025) yang juga menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa adanya tekanan fiskal dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Sholihat dan Aurora Lubis (2024) menyatakan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, Fadhli et al. (2022) serta Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi et al. (2022) menemukan bahwa tekanan fiskal belum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons tekanan fiskal melalui kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat.

Selain dipengaruhi oleh *fiscal stress*, kinerja keuangan daerah juga bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola serta mengalokasikan belanja daerahnya. Secara umum, belanja daerah terdiri atas dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara jelas dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berhubungan langsung dengan suatu program, seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan belanja tidak terduga (Kemenkeu, 2017).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset jangka panjang yang digunakan dalam pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan. Megasari (2025) menjelaskan bahwa investasi belanja yang dikelola secara tepat berpotensi menambah modal dan memberikan manfaat finansial jangka panjang. Dengan demikian, alokasi belanja modal yang produktif mendorong

efisiensi pengelolaan anggaran dan berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Fatimah Az Zahrah et al., 2023). Pengukuran belanja modal dilakukan dengan menetapkan nominal anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan aset dalam struktur APBD.

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang beragam. Oktaviani Putri, Nella Yantiana, dan Gita Desyana (2025) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Okadri dan Yentisna (2025) menunjukkan bahwa belanja modal, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Naila Maharani, Maria, dan Rosy Armaini (2025) yang menyatakan bahwa belanja modal secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, penelitian oleh Sari Yuliawati, Meti Zuliyana, dan Sasiska Rani (2024) menyimpulkan bahwa secara simultan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nova Rustiyani dan Irene Sukma Lestari Barus (2023) yang menyatakan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun secara simultan memiliki pengaruh signifikan.

Berbeda dengan hasil-hasil tersebut, penelitian oleh Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Priyono (2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan temuan antarpelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran, ketepatan sasaran belanja modal, serta sejauh mana belanja modal mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain dari *fiscal stress* dan belanja modal efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu ukuran penting dalam mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Tingkat efektivitas PAD menunjukkan sejauh mana pendapatan yang direncanakan dapat terealisasi sesuai target. Jika PAD dapat dihimpun secara efektif, berarti pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi lokal secara optimal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Yeyen et al. 2025).

Sebaliknya, pada kondisi ketika efektivitas PAD belum optimal, hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, baik akibat pemungutan yang belum maksimal maupun pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya tergali, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Anynda dan Hermanto (2020) menegaskan bahwa pengelolaan PAD yang efektif, efisien, dan ekonomis akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang

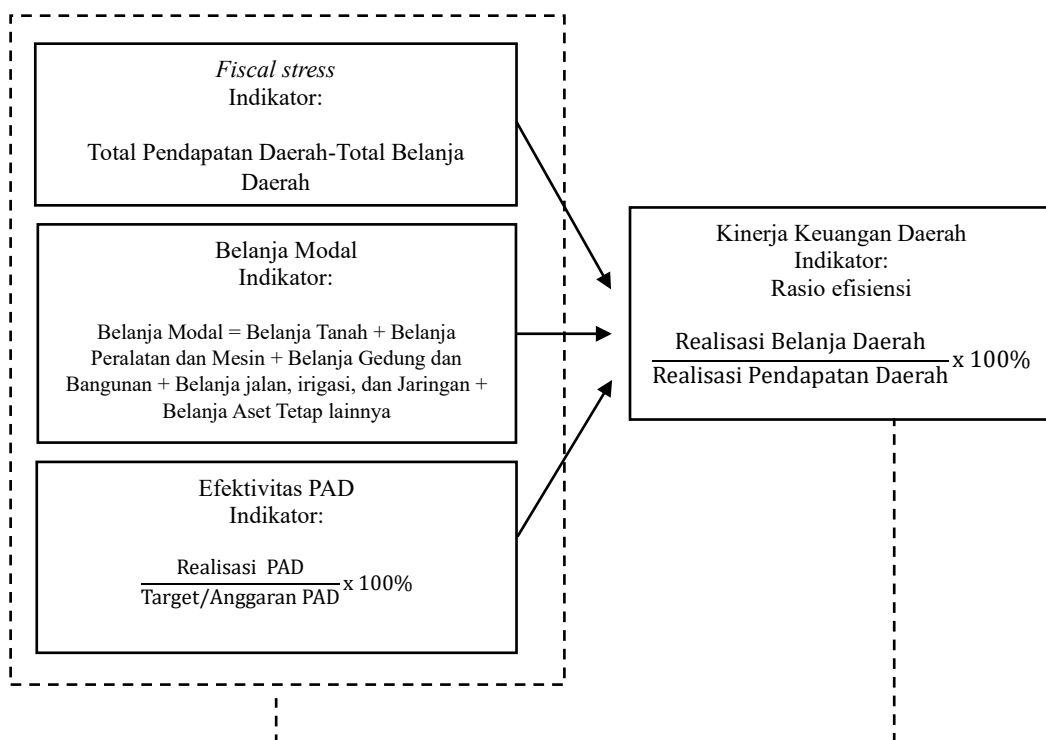
fiskal yang lebih besar dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan, yang pada akhirnya tercermin pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Rahil, Dwiymoko Puji Widodo, dan Yuni Siti Nuraeni (2024) menyatakan bahwa efektivitas PAD secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Arfiatul Mutsalisah, Ainiyyah Kusumastuti, dan Adinda Zaimatunnisa (2025) menemukan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Yeyen, Kartika Rachma Sari, dan Choiruddin (2023) yang menyimpulkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Rina Julia, Bainil Yulina, dan Riana Mayasari (2025) menegaskan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, Anynda dan Hermanto (2020) menyatakan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa semakin efektif realisasi PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sejalan. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Togu Sihotang, J. Ary Mollet dan Halomoan Hutajulu (2025) menunjukkan bahwa efektivitas PAD belum terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah serta efektivitas pemanfaatan dan penyerapan anggaran yang bersumber dari PAD.

Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran dan indikator dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan *Fiscal stress*, Belanja Modal dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah:



Keterangan :

Secara Parsial : —————

Secara Bersama-sama : - - - - -

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018:99). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara Bersama-sama *Fiscal stress*, Belanja Modal dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Terdapat pengaruh secara parsial *Fiscal stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Terdapat pengaruh secara parsial Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Terdapat pengaruh secara parsial Efektivitas Pendapatan Asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.